

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Jaringan advokasi transnasional yang telah dilakukan oleh SBMI dan Greenpeace untuk mengadvokasikan permasalahan mengenai perbudakan modern terhadap AKP Indonesia di kapal penangkap ikan telah lama dilakukan sejak tahun 2016. Strategi-strategi seperti *information politics*, *symbolic politics* dan *leverage politics* telah dilakukan untuk menekan pemerintah Taiwan. Strategi *information politics* dilakukan melalui pemberitaan, *report* dan film dokumenter. Kemudian, strategi *symbolic politics* dilakukan melalui *naming and shaming* serta *framing* di media hingga sejumlah aksi protes di ruang terbuka atau di depan kantor pemerintahan. Sementara itu, strategi *leverage politics* dilakukan dengan mempengaruhi aktor yang lebih kuat seperti Amerika Serikat untuk turut menekan industri perikanan Taiwan. Sedangkan pada strategi *accountability politics*, SBMI dan Greenpeace belum berhasil karena mengalami hambatan dari segi kultural pada yang mengakar di kehidupan masyarakat Taiwan.

Hambatan kultural ini terwujud dalam bentuk interpretasi nilai-nilai Konfusianisme yang dinilai tidak sesuai dengan karakteristik pekerja migran, terutama mereka yang tergolong ke dalam *blue collar worker* dari Asia Tenggara. Diskriminasi yang terjadi kepada para pekerja migran ini menjadikan posisi mereka rentan mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perbudakan modern yang terjadi pada AKP di kapal penangkap ikan Taiwan. Didukung oleh kurangnya aturan dan penegakan hukum yang melindungi hak-hak para AKP ini,

interpretasi Konfusianisme dalam lingkungan kerja yang sangat mengedepankan *hierarchical order* dan *filial piety* ini dapat melanggengkan praktik perbudakan modern, apalagi jika pemilik kapal memiliki sifat dasar yang keras dan eksploitatif. Banyaknya persepsi negatif masyarakat Taiwan terhadap para pekerja migran yang tergolong sebagai *blue collar worker* seperti *unskilled* dan *uneducated* menjadikan mereka tidak sesuai dengan kepribadian seseorang yang ideal menurut interpretasi dari Konfusianisme. Persepsi masyarakat Taiwan berdasarkan interpretasi Konfusianisme yang sudah mengakar terhadap pekerja migran ini turut mempengaruhi sikap negara dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Hal ini menyebabkan pemerintah Taiwan sampai saat ini masih resistan karena belum mengeluarkan keputusan lebih lanjut mengenai regulasi atau kebijakan yang komprehensif untuk menangani permasalahan perbudakan modern pada AKP di kapal penangkap ikan milik negaranya.

4.2 Saran

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan interpretasi Konfusianisme di Taiwan sebagai salah satu faktor yang menghambat keberhasilan jaringan advokasi transnasional yang sudah lama dilakukan oleh SBMI dan Greenpeace. Dalam keberjalanannya, penulis mencantumkan data pendukung mulai dari kasus-kasus yang dialami oleh beberapa AKP, respons pemerintah Taiwan dalam menanggapi kasus tersebut hingga wawancara kepada narasumber yang relevan terhadap topik ini. Walaupun belum bisa dibuktikan secara eksplisit, peneliti berusaha untuk mengelaborasi Konfusianisme terhadap sikap resistan Taiwan selama ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mempunyai saran untuk menggali lebih lanjut mengenai permasalahan AKP di kapal penangkap ikan jarak jauh Taiwan. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis mengenai kompleksnya permasalahan ini mulai dari broker-broker ilegal di Indonesia, tumpang tindih kewenangan dalam mengatur kebijakan terkait AKP di Indonesia, hingga broker-broker lain yang ada di Taiwan serta perkembangan diskusi antara Indonesia dan Taiwan dalam mengatasi permasalahan ini.